

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASCE di Amerika Serikat (1998), telah mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dalam peningkatan infrastruktur pada masa yang akan datang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi dalam berbagai tulisan artikel dan laporan studi akademik, pemimpin politik telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara bagiannya. Dalam mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE telah membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konsentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan. Hal yang sama sudah terjadi di Australia tahun 2001 yang mulai menggunakan model Amerika Serikat untuk membuat penilai infrastruktur di Australia.

Laporan infrastruktur *Fragile Foundation: A Report on America's Public Works* (1998), melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut menyusun *baseline* untuk mengevaluasi infrastruktur yang terdiri dari delapan kategori infrastruktur dengan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada

tingkatan C, yang artinya menunjukkan pencapaian berada pada tingkatan cukup. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Sehingga para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur. Sedangkan tahun 2001, menunjukkan adanya peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D. Hasil laporan tersebut diketahui bahwa terjadi hal yang sama pada laporan awal di tahun 1988 yaitu masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana dalam proses pengembangan infrastruktur sehingga ASCE mengusulkan biaya sebesar triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur beserta pemeliharaannya agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat.

Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012), memberikan pandangan yang kritikal untuk industri infrastruktur seperti Energi Pembangkit Daya dan Distribusi, Teknologi informasi dan komunikasi, Transportasi jalan, udara, laut dan air serta dan manajemen air dan limbah. Penilai

kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya.

infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang 2 yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Di Indonesia studi ini belum pernah dilakukan dalam pemerintahan SBY meskipun sudah membentuk MP3 AI untuk pengembangan daerah tertinggal namun prakiraan kebutuhan infrastruktur dan biayanya belum diketahui secara pasti sehingga dapat menimbulkan banyak masalah.

Menurut Catanese, Anthony J., dan Jamse C.S (1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan

dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Infrastruktur ini berfungsi untuk pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan. Maka infrastruktur ini harus dikenali dalam kaitan dengan kegiatan dan fungsi sosial dan ekonomi wilayah yang didukung dan dipelopornya. Misalnya kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya. Melihat pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman ini, maka keberadaannya ini harus benar-benar tepat guna, artinya tepat tempatnya dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang menjadi prasyarat mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kebutuhan masyarakat baik yang mampu disediakan

maupun tidak oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pendanaan

Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan

Keberadaan lembaga pengelola yang menangani masalah perencanaan infrastruktur harus ditunjang oleh kemampuan manajemen pengelolaan. Mulai dari siapa yang merencanakan, melaksanakan, sampai pada yang memelihara hasilnya nanti.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakatnya juga dapat menentukan perencanaan infrastruktur permukiman untuk wilayahnya. Masyarakat berpenghasilan tinggi akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam kualitas maupun jenisnya.

4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis yang tinggi dari perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman, tidak saja akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, namun dapat pula menekan biaya pembangunan. Kemampuan teknis ini diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur mengingat dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selalu tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan.

5. Kondisi Fisik Lingkungan

Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistem perencanaan, topografi yang datarakan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam. Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata lingkungan dan struktur tanah.

6. Bencana Alam

Faktor bencana alam sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam merancang dan membangun infrastruktur. Untuk mengurangi kerusakan akibat bencana maka harus memperhatikan konfigurasi (bentuk, ukuran, ketinggian, dan orientasinya), intensitas dan frekuensi ancaman bencana di suatu wilayah, standar standar rancangan struktural dan non struktural, pilihan bahan/material inti dan pendukung serta kualitas konstruksinya.

7. Peran serta Masyarakat

Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang

dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Bengkulu sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Bengkulu sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya. Menurut Tataruang dinas PU Provinsi Bengkulu (2014) mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di wilayah Kota Bengkulu seperti jalan darat yang sudah diaspal dalam Kota Bengkulu adalah sepanjang 474 Km, 228 km di antaranya dalam keadaan baik dan 242 km dalam keadaan rusak sedang, pelabuhan laut yakni Pelabuhan Samudera pulau Baai yang merupakan pelabuhan yang dapat diandalkan untuk menopang aktivitas bongkar muat arus barang dan jasa serta penumpang. Luas lahan pelabuhan ini 1.200 Ha, dengan perairan seluas 3.180 Ha, dan pelabuhan seluas 250 Ha. Kondisi fisik pelabuhan saat ini mempunyai panjang alur masuk pelabuhan 800 m dengan jumlah dermaga 3 yakni Dermaga Nusantara dengan panjang 165 m dan lebar 18 m, Dermaga Lokal

Panjang dengan panjang 124 m dan lebar 10 m dan Dermaga Nusantara dengan panjang 84 m dan lebar 18m, serta bandar udara yang melayani penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis pesawat. Ini dapat dilakukan setelah dilakukan peningkatan panjang landasan pacu. Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan di Kota Bengkulu antara lain: Sriwijaya Air, Lion Air; Batavia Air, dan Mandala Airline.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi Bengkulu.

1.3 Tujuan

Menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), air minum, telekomunikasi, listrik di kotaBengkulu.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.